

# TEKS PESANTREN TENTANG PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Said Aqil Siradj

## **Abstract**

*Scientific texts of pesantren cannot be separated from the treasure of Yellow Books of pesantrens written by Islam scholars from 3<sup>rd</sup> century to 10<sup>th</sup> century of Hijriyyah. Yellow Books are primary references of the majority, if not all, of pesantren communities to solve any humanity problems with ubudiyah (worship) muamalat (social interaction), munakabat (marriage), siyasah (strategy), etc. Through these Yellow Books pesantrens produce tasamuh, tawazun and i'tidal attitudes. Related to the nationality problem recently discussed everywhere, in term of doctrinism, pesantrens have long developed what a so-called principle of ukhuwah wathoniyah (nationality brotherhood). This article points out how pesantrens, through their education in form of moral cultivation, have proved themselves as being capable of keeping children from moral erosion and decadence. It will save the nation*

---

Lahir di Cirebon 03 Juli 1953.  
Lulus S1 Universitas King Abdul Aziz, 1982, S2 Universitas Umm al-Qura Mekkah, Fakultas Ushuluddin, 1987, dan S3 Universitas Umm al-Qura Mekkah, Fakultas Ushuluddin, 1994. Menjabat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang (UNISMA), 1999-2003; Anggota MPR RI Fraksi Utusan Golongan, 1999-2004. Pengalaman Organisasi: Ketua KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama) Mekkah, 1983-1987; Wakil Katib 'Am PBNU, 1994-1998; Katib 'Aam PBNU, 1998-1999; Rois Syuriah PBNU, 1999-2004; Ketua PBNU, 2004-sekarang

*from social diseases such as corruption, collusion, and so on.*

**Keywords:** *pesantren text, nationality education, moral cultivation, moral erosion and decadence.*

## **Pendahuluan**

Pondok pesantren tampaknya perlu selalu dibaca sebagai warisan sekaligus kekayaan kebudayaan-intelektual nusantara. Lebih dari itu, dalam sejumlah aspek tertentu, pesantren juga harus dipandang sebagai benteng pertahanan kebudayaan itu sendiri, oleh karena peran sejarah yang dimainkannya. Harapan ini tentu saja tidak terlalu meleset dari konstruk budaya yang digariskan pendirinya. Selain diangankan sebagai pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan yang berdimensi religius atau sekedar improvisasi lokal, pesantren juga dipersiapkan sebagai penggerak transformasi bagi komunitas masyarakat dan bangsa. Menariknya, angan-angan tersebut justru dibe-rangkatkan dari “landasan tradisi” masyarakat setempat.

Dalam perkembangan sejarahnya, peran kebudayaan menonjol dan berpengaruh yang dimainkan pesantren hingga kini adalah konsentrasi dan kepeloporannya dalam mempertahankan dan meles-

tarikan ajaran Islam ala Aswaja serta mengembangkan kajian-kajian keagamaan melalui khazanah berbagai kitab kuning (*al-kutubutturats*) yang sering disebut oleh kalangan pesantren sendiri sebagai instrumen pokok untuk memperdalam agama (*tafaqquh fi al-din*).

Sebagai hasil dari pergulatan kebudayaan yang kreatif antara tradisi kajian, sistem pendidikan dan pola interaksi kyai-santri-masyarakat yang dibangunnya, pesantren akhirnya memiliki pola yang spesifik. Itulah sebabnya, pesantren merupakan sub-kultur tersendiri dalam pelataran kultural masyarakat dan bangsa Indonesia. Selaras dengan tuntutan modernitas dan keharusan merespon kenyataan negara-bangsa, pesantren pun tetap menjaga dan melakukan perubahan diri dengan tetap dalam koridor pelestarian nilai-nilai agama.

## **Sikap Hidup Pesantren**

Pesantren mungkin bisa dikatakan sebagai model kehidupan yang unik. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks ini berdiri beberapa buah bangunan. Rumah kediaman pengasuh yang dalam bahasa jawa disebut *kyai*

atau di daerah Sunda disebut *Aje-ngan*. Ada juga sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran sering disebut sekolah yang juga terlebih sering mengandung arti sekolah dan asrama sebagai tempat tinggal para siswa pesantren atau istilahnya santri, sebuah nama yang diambil dari bahasa Sansekerta dengan perubahan pengertian.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berakar dari masyarakat. Kyai pendiri sebuah pesantren akan hidup berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat pun merasa memilikinya. Sejarah pesantren, barangkali bisa dilacak berawal dari hasil asimilasi budaya. Pada abad ke-11, Dharmawangsa dari kerajaan Dhoho, Kediri mendirikan padepokan yang menghimpun para cantrik untuk mendalami kitab-kitab Hindu. Kata cantrik merupakan akar kata santri yang berkonotasi pada seseorang yang belajar dan mendalami ajaran Islam. Setelah Islam masuk, model pendidikan padepokan ini berubah menjadi sebuah institusi pendidikan yang populer dengan pesantren. Jadi, disini terjadi proses Islamisasi pada institusi pendidikan.

Dalam sejarahnya, terungkap bahwa lahirnya pesantren berawal

ketika para kyai yang memiliki darah biru, keluar dari keraton yang kala itu sudah terkontaminasi dengan budaya Belanda. Prinsip para kyai waktu itu adalah kalah tapi selamat, meninggalkan urusan duniawi dan menyelamatkan agama. Makanya, kebanyakan pesantren berada di kampung-kampung.

Corak tersendiri dari kehidupan pesantren dapat dilihat juga dari struktur pengajaran yang diberikan. Dari sistematika pengajaran, dijumpai jenjang pelajaran yang berulang-ulang dari tingkat ke tingkat tanpa terlihat kesudahannya. Persoalan yang diajarkan seringkali pembahasan serupa yang diulang-ulang selama jangka waktu bertahun-tahun. Dimulai dengan kitab kecil (*matan*) yang berisikan teks ringkas dan sederhana, pengajian akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkatan kitab pertengahan (*mutawassithat*). Kyai bertugas mengajarkan berbagai pengajian untuk berbagai tingkat pengajaran di pesantrennya dan terserah kepada santri untuk memilih mana yang akan ditempuhnya.

Tetapi, keseluruhan struktur pengajaran tidak ditentukan oleh panjang atau singkatnya masa seorang santri mengaji pada kyainya, karena tidak adanya keharusan me-

nempuh ujian atau memperoleh ijazah formal dari kyainya. Satu-satunya ukuran yang sering digunakan adalah ketundukannya kepada sang kyai dan kemampuannya memperoleh “hikmah dan barokah” dari sang kyai. Sering dikatakan, kebesaran seorang kyai tidak ditentukan oleh jumlah bekas santrinya yang lulus dan memperoleh ijazah formal dari sebuah perguruan, melainkan dari jumlah bekas santrinya yang dikemudian hari menjadi kyai atau menjadi orang-orang yang mengabdikan pada masyarakatnya.

Disamping kurikulum yang nampak lentur, keunikan pengajaran pesantren juga dapat ditemui pada model pemberian pelajarannya, kemudian dalam penggunaan materi yang telah diajarkan kepada dan dikuasai oleh santri. Pelajaran diberikan dalam pengajian yang berbentuk kuliah terbuka, dimana sang kyai membaca, menerjemahkan dan kemudian menerangkan persoalan-persoalan yang disebutkan dalam teks pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian, si santri membaca ulang teks itu, entah dihadapan sang kyai atau setelah dia kembali ke biliknya, ataupun dalam pengajian ulang antara sesama santri setingkat pengajian. Biasanya ini memiliki nama bermacam-ma-

cam sesuai pilihan pesantren itu sendiri seperti *musyawarah*, *muthala'ah*, *muraja'ah* dan sebagainya.

Struktur pengajaran yang unik dan memiliki khas ini, sudah tentu juga menghasilkan pandangan hidup dan aspirasi yang khas pula. Visi untuk menggapai ridha di sisi Allah menempati kedudukan terpenting dalam tata nilai pesantren yang dikenal dengan nama keikhlasan. Wajah lain dari pandangan hidup ini adalah kesediaan yang tulus untuk menerima apa saja kadar yang diberikan oleh kehidupan. Walaupun kedengarannya aneh dan penuh gema sikap hidup fatalistik bila ditinjau dari ukuran-ukuran di luar pesantren, pandangan hidup semacam ini memiliki segi positifnya sendiri. Di antaranya kemampuan menciptakan penerimaan perubahan status dalam kehidupan dengan mudah, serta fleksibilitas para santri untuk menempuh karir masing-masing kelak. Dengan demikian, dalam pesantren sebenarnya secara laten telah terdapat dinamisme yang bersifat adaptif terhadap kemajuan diluarnya.

Dengan pola kehidupannya yang unik, pesantren mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu, dalam jangka

panjang pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat di sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri mengorbankan identitas diri. Pola pertumbuhan hampir setiap pesantren menunjukkan gejala kemampuan melakukan perubahan total itu.

Sebagai sistem nilai yang holistik, nilai-nilai yang diestimasi pesantren didasarkan pada ajaran agama secara formal yang berkembang selama berabad-abad. Kerangka sistem nilai pesantren yang diambilalih dari doktrin barokah merupakan pancaran dari kyai-ulama dan santri. Kepercayaan bahwa pengawasan kyai pada santri akan mempermudah penguasaan ilmu-ilmu agama yang valid (*mu'tabar*) merupakan dasar dari sistem nilai ini. Santri ditekankan harus berusaha menyamai pengalaman kyai dalam hal pengajaran agama secara detail. Mereka harus mengalami periode permulaan dalam bentuk perjuangan fisik (*tirakat*) dengan melaksanakan apa saja yang dipesankan kyai secara terus menerus.

Kebebasan relatif pondok pesantren dari intervensi eksternal dalam skala besar telah memberikan ruang untuk melakukan transformasi yang dibutuhkan bagi eksperimentasi dengan ide-ide dan gagasan para pemikir. Kebebasan relatif hasil dari ketrampilan pesantren untuk merespon metode konstruktif dari tantangan eksternal seperti sistem sekolah Barat adalah situasi otonomi yang diberikan oleh pesantren dan cukup fleksibel dalam rangka memelopori konsep pendidikan baru. Dalam perspektif kebudayaan, melaksanakan peraturan pelengkap dengan kesadaran ideologis memberikan landasan kuat untuk transformasi sosial yang fundamental dan dibutuhkan oleh negara di masa depan.

### **Pesantren dan Kitab Kuning**

Seperti dikemukakan di atas, pesantren merupakan suatu komunitas sub-kultur dari masyarakat yang sudah muncul sejak ratusan tahun yang lampau. Kehadirannya memiliki dua misi utama, edukasi dan sosial. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren bisa dikatakan sebagai institusi yang paling tua di negeri ini. Ia merupakan salah satu aset umat Islam, dan kepadanya kelestarian ajaran Islam

ala Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja) digantungkan.

Sementara sebagai sebuah lembaga sosial, pada umumnya pesantren hidup dari, oleh dan untuk masyarakat. Visi ini menuntut peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa dan negara yang terus berkembang. Dalam sejarahnya pesantren tumbuh dan berkembang sebagai penggerak transformasi masyarakat. Perkembangan masyarakat tidak lepas dari sentuhan pesantren dalam memaksimalkan potensi dirinya dalam menjaga proses-proses adaptasi, akulturasi dan bahkan untuk sebuah perubahan. Dengan kekuatan dan potensinya ini sebagai bagian dari gerakan sosial, pada dasarnya pesantren sebagai lembaga *tafaqqub fil-din* mengemban misi meneruskan risalah kemanusiaan Nabi Muhammad Saw., sekaligus melestarikan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah *ala thariqh al-madzahib al-arba'ah* (menurut mazhab Islam yang empat).

*Ala thariqh al-madzahib al-arba'ah*. Ya, sepiantas dalam sebutan ini tidak ada masalah. Namun, sebetulnya sebutan ini ujung-ujungnya membatasi fokus *tafaqqub fil-din* pada orientasi fiqh semata. Yang

di luar fiqh hanya dianggap sekunder belaka. Seakan-akan, kalau sudah belajar fiqh, maka akan dianggap *tafaqqub fil-din*. Kondisi ini diperparah kalau kita melihat materi kajian fiqh itu sendiri. Meski diakui sebagai pengikut *al-madzahib al-arba'ah*, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, tetapi karya-karya para *aimmah al-madzahib* (imam-imam mazhab) jarang atau malah belum pernah tersentuh. Kajian kalangan pesantren hanya berkuat di sekitar pendapat para ulama mazhab, seperti tertuang dalam *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahab* dan sejenisnya.

Selain itu, semangat kritis Aswaja selama ini terlihat mandul dan stagnan di lingkungan pondok pesantren. Padahal semangat kritis semacam ini yang pernah dikedepankan oleh para ulama *Salafuna as-Salih*, seperti kalangan *muhadditsin* (ahli hadis), imam mazhab, atau seperti yang ditunjukkan oleh Imam al-Asy'ari (w. 324 H), Imam al-Maturidi (w. 332 H), dan Imam al-Ghazali (w. 505 H).

Sementara dalam aspek tasawuf, *ilmu hikmah* sering dikacaukan dengan ilmu perdukunan. Seseorang yang memiliki kekebalan di bidang ilmu kanuragan dianggap telah mencapai derajat tinggi dalam

tasawuf. Selain itu, variasi *wiridan* dengan motivasi mencapai *fadlilah* atau keutamaan tertentu, juga dianggap sebagai langkah menuju sufi sejati.

Sebagai jalan keluar dari stagnasi di atas, menurut saya, harus dimulai dari tiga pintu: *jihad*, *ijtihad* dan *mujahadah*. Jihad biasanya hanya dipahami secara fisik, seperti pembangunan sarana ibadah, mesjid, madrasah, jembatan, atau berperag melawan musuh (*kafir harbi*). Padahal, kita perlu menengok pada apa yang diungkap oleh Kitab *I'ana-tutthalibin*, seperti dibahas dalam Bab 6 di atas. Menurut kitab yang sering dijadikan rujukan di kalangan pesantren, jihad bisa diimplementasikan sebagai tindakan amal "*daf' dlarar ma'shumin musliman kana aw dzimmiyan*" (memenuhi kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat, muslim maupun non-muslim). Ini bisa dikongkretkan pada upaya penegakkan eksistensi Allah (melalui ibadah *mahdlab*), upaya menegakkan hukum-hukum Allah (*hudud*), berperang di jalan Allah jika diserang musuh, dan juga menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan beserta sarana kesehatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dari konsep ini, jelas bahwa pesantren baru memenuhi sebagian

saja; selebihnya masih banyak lahan yang belum dipikirkan.

Pintu berikutnya adalah *ijtihad*. Yakni, pencurahan pikiran dalam rangka menggali makna-makna yang tersingkap dalam kalam Ilahi, baik dalam bidang syariat, teologi ataupun etika dan siyasah. Asumsi bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup sebenarnya juga tidak berdasar. Selain tidak jelas siapa yang melontarkan, ide itu jelas akanengebiri segenap inovasi umat Islam sebagai *khaira umma*, umat terbaik. Kalau pun tidak dimungkinkan munculnya mujtahid-mutlaq atau mujtahid-mazhab, seperti model Imam Abu Hanifah atau Imam as-Syafi'i. Tapi minimal yang dibutuhkan adalah hadirnya *mujtahid fatwa* atau *mujtahid tarjih*. Kalangan pesantren memungkinkan untuk menghasilkan generasi mujtahid seperti itu. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi sosio-kultural para ulama kurun sebelumnya, fasilitas *maraji'* (kitab-kitab kuning referensial) pada saat ini lebih terpenuhi secara lengkap. Dengan munculnya *mujtahid fatwa* atau *mujtahid tarjih* ini, diharapkan lahirnya sekian *aqwal* seperti yang kita temukan dalam literatur fiqh seperti *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahab*, dan semacamnya. Jadi bukan lagi seperti

yang dominan selama ini, dengan hanya merujuk pada *aqwal* para ulama mutaakhir. Metode ijihad semacam inilah yang kemudian dipopulerkan oleh NU dengan sebutan *mazhab manhaji*, bermazhab secara metodologis.

Pintu ketiga untuk membuka jalan keluar dari stagnasi di kalangan pesantren adalah *mujahadah*. Ini merupakan satu bentuk *tazkiyatun nafs*, penyucian hati, atau sterilisasi hati dan jiwa dalam rangka *taqarrub ilallah*, mendekatkan diri kepada Allah. Pengalaman kesufian seperti ini sangat *privacy*, tanpa harus dipaksakan melalui jalan tarekat. Ini biasanya melampaui beberapa *maqamat* dan *abwal*. Seorang sufi bukanlah menghabiskan waktunya duduk di atas sajadah dengan memegang tasbih. Seorang sufi ikut terlibat dalam gerak laju zamannya, termasuk dalam menggerakkan proses transformasi masyarakat. "*al-Shufi ibnu waqtih*", demikianlah sebutan yang sering melekat kepada seorang ahli tasawuf atau sufi yang bergolak dengan semangat zamannya. Seorang sufi ibarat air yang sangat mudah beradaptasi dalam segala situasi maupun kondisi.

Dalam berbagai tahapan dan tingkatan dalam mewujudkan jihad, ijihad dan mujahadah di atas, se-

betulnya pesantren sendiri telah banyak melahirkan pembaharuan yang sangat mendasar sekali. Misalnya pada tahun 1923 Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, sudah menerima pendidikan dalam pondok untuk pelajar puteri. Padahal saat itu seluruh dunia Islam belum bersedia menerima pendidikan untuk kaum Hawa. Kalau Pondok Denanyar yang diasuh oleh *al-maghfurlah* KH. Bisri Sansuri telah mengedepankan ide yang monumental, kenapa kita tidak. Padahal sosok KH. Bisri dikenal sebagai seorang *faqih* yang mumpuni.

Kemudian, ketika menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1950, *al-maghfurlah* KH. Wahid Hasyim membuat keputusan mengejutkan. Beliau menerima murid perempuan masuk Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA), yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Syari'ah di IAIN. Ini sebuah keputusan fundamental, karena memberi jalan bagi perempuan untuk menjadi hakim agama. Hingga sudah ribuan hakim perempuan berbaran di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan pendapat al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultabnah*, misalnya, yang mengharuskan seorang hakim (*qadli*) berjenis kelamin laki-laki, maka apa yang dilakukan



KH. Wahid ini tentu sebuah terobosan yang berani dan maju. Demikian pula terobosan *al-maghfurlah* KH. Achmad Shiddiq menerima asas tunggal Pancasila dan KH. Abdurrahman Wahid yang memperkenalkan wacana kebangsaan dalam komunitas pesantren.

Kitab kuning adalah faktor penting yang menjadi karakteristik pesantren. Selain sebagai pedoman bagi tata cara keberagamaan, kitab kuning juga difungsikan sebagai referensi (*marji'*) nilai universal dalam menyikapi segala tantangan kehidupan. Segi dinamis yang diperlihatkan kitab kuning adalah transfer pembentukan tradisi keilmuan yang fikih-sufistik didukung penguasaan ilmu-ilmu instrumental, termasuk ilmu-ilmu humanistik (*adab*). Tanpa kitab kuning dalam pengertian yang lebih kompleks, tradisi intelektual di Indonesia agaknya tidak akan bisa keluar dari kemelut sufi-ekstrem dan fikih-ekstrem.

Apa yang dicapai oleh Kyai Ihsan Jampes melalui karyanya *Siraj al-Thalibin* dan *Manabij al-Imdad* merupakan contoh prestasi intelektual yang mengandalkan kitab kuning. Ini juga membuktikan kemampuan ulama di pesantren untuk mengkombinasikan kemampuan mendalami ilmu-ilmu agama secara

tuntas dan mengamalkan tasawuf secara tuntas pula.

Dengan demikian, kitab kuning yang telah ditulis dan dipelihara terus dalam pesantren bisa menjadi "landasan pacu" dalam memahami sekaligus merumuskan kembali pemikiran keislaman dalam merespon kemajuan. Pesantren yang akrab dengan khazanah klasik inilah yang membedakan dengan pesantren-pesantren lain yang lebih cenderung pada adopsi terhadap keilmuan Barat. Melalui khazanah klasik ini pula, pesantren melahirkan sikap-sikap yang *tasamuh*, *tawazun* dan *I'tidal*. Dengan begitu, sulit diramalkan akan terjadinya sikap ekstrem atau radikal yang saat ini tengah menjadi momok dunia.

Kekayaan tradisi pesantren dapat dijadikan modal bagi dibangunnya sebuah tradisi baru. Dalam konteks ini sistem pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk tradisi. Di tengah tuntutan pesantren untuk melewati fase transisi menuju penguatan tradisi dengan modernitas, pesantren juga dituntut untuk memperkuat dasar-dasar metodologi pendidikannya. Maka hal penting yang perlu dirumuskan kembali adalah sistem dan proses pendidikan pesantren yang

dapat menjamin keberlangsungan ruh pendidikan itu sendiri.

*Pertama, al-ta'lim*, yakni proses transformasi ilmu pengetahuan. Dengan ini pendidikan mampu membangun interaksi keilmuan yang mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Maka metodologi yang dikembangkannya perlu memberikan ruang keseimbangan kedua sisi secara bersamaan: fisik-metafisik, rasional-irasional, substantif-formalistik, dan seterusnya. Konsekuensinya, kita perlu menerapkan kajian komprehensif yang mirip persoalan paket. Seperti fiqih-ushul fiqih, al-Quran-tafsir, kalam-mantiq, dan seterusnya.

*Kedua, al-tadris* atau proses afektif. Yakni, pendidikan yang mampu menumbuhkan transformasi ilmu pengetahuan dengan berlandaskan pada totalitas pengalaman keilmuan. Proses pendidikan yang meliputi teori (keilmuan) dan praktik (pengalaman) ini mampu mengarahkan pendidikan menjadi matang dan dewasa (Q.S. Ali Imran: 79).

*Ketiga, al-ta'dib*, yakni proses pendidikan yang mampu memberi ruang secara luas bagi proses kesadaran berbudaya, beradab, taat hukum, menjunjung tinggi etika dan sopan-santun. Proses *ta'dib* yang benar adalah sebagaimana

yang dicontohkan Rasulullah Saw. dalam sabdanya, "*Addabani Rabbi fa absana ta'diibi*" (Saya dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya *ta'dib*). Proses *ta'dib* harus didasari oleh komitmen kuat membangun moralitas manusia yang dimulai dari diri sendiri.

*Keempat, at-tarbiyah*, yaitu proses pendidikan yang menyerukan untuk berpegang pada prinsip pengakuan bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta, (*rabb al-alamiin*). Sebagaimana dituangkan dalam ayat "*Waja'ala lakum al-sam'a wal-absbaara wal-af'idab*" (Dialah Tuhan yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati untuk merasakan). Maksudnya, Allah menciptakan manusia dari tiga sudut pandang: pendengaran, penglihatan dan perasaan. Pada tataran aplikatif, metodologi pendidikan seperti ini harus mampu mengerahkan segala potensi intelektual dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik yang meliputi unsur material dan immaterial. Jadi tidak hanya berorientasi kepada capaian kuantitas, melainkan juga kualitas. Tidak hanya berpikir, tapi juga *tafakkur*, merenung dan menjiwai. Tidak hanya sebatas *istima'*, mendengar, tapi juga *al-sam' wal-tha'ab*, dengar dan patuh. Bukan hanya

*aql* tapi juga *fahm. Tarbiyah*, dengan demikian, berorientasi pada kesempurnaan lahir dan batin. Sehingga pada saatnya nanti proses pendidikan akan mampu melahirkan pribadi-pribadi yang mempunyai kepribadian yang paripurna. Jika pesantren mampu mempertahankan ruh pendidikan di atas maka di masa-masa yang akan datang kita tidak akan mengalami kekeringan tradisi yang agung (*Great Tradition*), yakni tradisi pengajaran agama Islam, sebagaimana yang telah diwariskan pesantren untuk kemajuan Nusantara.

### **Pesantren dan Kebangsaan**

Asal muasal kelahiran pondok pesantren sangatlah sederhana. Awalnya, seorang *faqih* (sebutan pakar juriprudensi Islam, *fiqh*) setelah melahap tumpukan kitab-kitab di berbagai pesantren, bahkan terkadang sampai di Timur Tengah, datang ke suatu kampung. Mula-mula ia mendirikan musholla, langgar atau surau untuk menampung masyarakat untuk shalat berjama'ah. Kepiawaian dan ke-'*alim-an* seorang *faqih* semakin hari kian tersebar ke berbagai daerah. Apalagi ditambah cerita dari mulut ke mulut dari warga yang mengaku simpatik terhadap pengajian sang

*faqih* setiap *ba'da* shalat wajib. Suasana pengajian pun semakin meningkat dan padat. Termasuk materi pengajarannya. Dari hanya sekedar bisa membaca kalimat Syahadat, belajar membaca huruf Arab dan al-Quran, bahasa Arab, hingga akhirnya seluruh khazanah Islam yang dikuasai sang *Faqih* disuguhkan dalam forum pengajian tersebut. Jama'ahnya pun semakin hari bertambah meluap. Jika awalnya hanya dihadiri penduduk sekitar yang dapat dihitung jari, lama-kelamaan masyarakat dari kampung lain berbondong-bondong pula, bahkan dari berbagai pelosok dan penjuru daerah.

Semangat para jama'ah yang begitu tinggi, terutama dari kalangan anak-anak dan anak muda, mendorong mereka untuk tetap berada dan tinggal di samping sang *Faqih* agar dapat mewarisi ilmu darinya secara lebih intensif. Sang *faqih* pun kemudian mendapat gelar *kiai*. Kondisi ini mengharuskan mereka berdomisili dekat sang *kiai*. Karena daya tampung *ndalem* (rumah) *kiai* sangat terbatas, para santri bersama wali santri akhirnya saling bergotong royong dan bahu membahu mendirikan asrama (kamar, *gotha'an*). Dalam bangunan baru ini, para santri tidak hanya

belajar mengaji saja, tetapi juga mulai membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Dari bangun tidur, mandi, memasak, mencuci pakaian, hingga tidur kembali, mereka senantiasa mandiri. Aktivitas sehari-hari semacam ini terus berlanjut hingga bertahun-tahun, sampai santri diizinkan sang kiai meninggalkan pesantren untuk pindah ke pesantren lainnya atau menempuh hidup rumah tangga.

Struktur pesantren juga tak kalah sederhananya. Kiai sebagai *top-leader* (sebagai uswah, teladan) menjadi pemimpin tunggal yang mengatur secara langsung komunitas tersebut. Mulai dari urusan para tamu, santri baru, penentuan kitab-kitab kajian hingga aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan dalam lingkungan pesantren. Seiring dengan bertambahnya jumlah santri, sang kiai pun menunjuk salah seorang santri senior untuk menjadi pengurus rumah tangga pesantren, yang dikenal dengan sebutan "*lurah pondok*". Melalui pengurus baru inilah, semua urusan sang kiai didelegasikan. Struktur semacam ini menempatkan pondok pesantren sebagai "kerajaan-kerajaan kecil" (*mulukul-thawaiif* atau *emirat*), dimana di antara satu pesantren dengan lainnya

ada sejumlah aturan dan aktivitas yang berbeda.

Sementara itu, dalam bahasa Arab, pesantren dikenal dengan istilah "*al-ma'bad*" atau "*al-ribath*" seperti yang dikemukakan oleh ar-Razi dalam *Mukhtar al-Shihab*. Sebuah *ribath* adalah "sebuah tempat yang selalu dikunjungi dan didatangi orang meskipun letaknya nun jauh di sana".

Secara substansial, pesantren itu tidak terlepas dari *al-mas'uliyah al-arba'ah* (empat kapabilitas), yaitu: *pertama, mas'uliyah al-diniyyah* (*relegion capability*) yang diimplementasikan dalam kiat pesantren untuk memperjuangkan *da'wah Islamiyyah* yang nota-bene dia berarti sebagai tumpuan harapan bagi pemecahan semua *masa'il al-diniyyah*. *Kedua, masuliyah al-tsaqafiyah* (*educational capability*) yang lebih meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan umat. *Ketiga, al-mas'uliyah al-'amaliyyah* (*practice capability*) yang lebih mengutamakan pada realisasi hukum Islam/*syari'at* dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial-masyarakat. *Keempat, al-mas'uliyah al-qudwah* (*moral capability*) yang lebih memusatkan pada perilaku akhlak al-karimah.

Ruh pesantren juga tidak terlepas dari misi al-Qur'an surat al-

Hajj ayat 54, “*waliya lama al-ladziina utu al’ilm annaba al-haqqu min rabbika fa yu’minuu bibi fa tukhbitha labu qulubuhum wa inna allaha la-haadi al-ladziina aamanu ilaa shirathin mustaqim*” (“Dan agar orang-orang yang diberi ilmu meyakini bahwasannya al-Qur’an itulah yang benar dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus).

Lembaga yang sering disebut-sebut “tradisional” itu, kini memasuki era globalisasi dan milenium ketiga. Dan juga mendapat sorotan cukup tajam. Masalahnya, sungguhpun dikatakan tradisional, mereka sampai sekarang masih tetap eksis, bahkan semakin mendapat simpati. Terlebih lagi dalam merespons krisis bangsa yang berkepanjangan di Indonesia. Julukan “tradisional” pada diri pesantren sebenarnya lebih sebagai penyederhanaan masalah yang belum tuntas, dan bukanlah sesuatu yang substantif. Terlebih jika dikontraskan dengan iklim modernitas atau rasionalitas, pasti akan semakin tidak jelas dan buram. Soalnya, fenomena belakangan ini justru banyak mereduksi nilai-nilai substantif pesantren. Misalnya yang dilakukan berbagai institusi pendi-

dikan modern yang menggalang terciptanya doktrin “sumber daya manusia” yang handal untuk memasuki abad 21. Jadi pesantren hanya ditempatkan sekedar sebagai obyek dari sistem pendidikan modern.

Malah justru sebaliknya pesantren yang harus ditempatkan sebagai subyek di antara sekian bentuk dan sistem pendidikan modern yang ada di Tanah Air. Model pendidikan kepramukaan, sekolah model SMU Taruna Magelang, sekolah model “*boarding school*”, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan sipil maupun militer – semuanya itu membutuhkan pengalaman pendidikan model pesantren. Semuanya membutuhkan aplikasi nilai-nilai dan sistem pesantren. Tidak salah, kalau pola pendidikan pesantren seperti itulah yang sebenarnya merupakan *mainstream* lembaga pendidikan bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak berabad-abad.

Sejarah juga mencatat, bahwa pesantren adalah benteng pertahanan terakhir bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun umat Islam di negeri ini. Berdirinya Republik ini tidak bisa dilepaskan dari jasa para ulama alumni pesantren. Begitu pula, komunitas pesantren punya andil dalam mengatasi pemberontakan komunis dan kaum

separatis pengacau Republik Indonesia. Bagi umat Islam, melalui pesantren lah mereka berharap kontinuitas dakwah Islam terus berlanjut. Hilangnya pesantren, berarti akan lenyap pula para ulama (agamaan) serta orang-orang yang salih. Kalau sudah demikian tinggal menunggu sirnanya agama tersebut. Sungguh pun saat ini telah menjamur sejumlah institusi pendidikan formal yang berlabelkan Islam, namun *output*-nya ternyata tak mampu melahirkan para ulama yang bisa dikatakan sebagai pewaris para Nabi.

Penanaman nilai-nilai moralitas di pesantren sampai saat ini terbukti mampu mempertahankan anak bangsa dari erosi dan dekadensi moral. Pembentukan jati diri manusia yang ber-*akhlaqul karimah* demi terwujudnya insan paripurna, merupakan salah satu misi lembaga pesantren. Sikap tulus-ikhlas, sabar, tawakal (berserah diri), tawadlu' (hormat), jujur serta mandiri, semuanya merupakan nilai-nilai yang ditanamkan di pesantren. Manusia-manusia tipe tersebut saat ini sungguh langka ditemukan. Padahal, hanya jiwa yang terpatri dengan nilai-nilai mulia itulah bangsa ini akan terselamatkan dari korupsi, manipulasi, kolusi serta penyakit-

penyakit lain yang akan menyeret bangsa ini ke dalam kondisi krisis berkepanjangan — *na'udzu billah, tsumma nu'udzu billah min dzalik*.

Independensi pesantren membuktikan kokohnya lembaga tersebut dalam memikul beban untuk meneruskan perjuangan para Nabi dan Rasul. Sikap ini pula yang menyelamatkan umat manusia dari rezim otoriter yang ingin mempertahankan status quo. Sikap ini semakin mengental dalam sanubari para santri. Ini sebagai konsekuensi logis dari ajaran tauhid (monoteisme) yang menegaskan seluruh kekuatan dan sesembahan selain Allah Swt. yang patut disandari dan disembah. Ajaran yang bermuara para kalimat "*La ilaha illallah*" itu sepanjang sejarah mampu menaklukkan seluruh kekuatan yang ingin menyaingi kekuatan dan kekuasaan Allah Swt.

Dalam konteks kehidupan politik, pondok pesantren secara langsung tidaklah diproyeksikan sebagai tempat kaderisasi politik. Pesantren memang bukan panggung politik. Pelajaran politik sangat minim diperkenalkan. Dari ratusan kitab kuning yang dikaji, buku-buku fiqih siyasah jarang dijumpai. Referensi yang sering diandalkan biasanya hanyalah buku *al-Abkam*

*al-Sulthaniyah*, suatu kitab yang tidak bisa dikategorikan sebagai rujukan ilmu politik. Kitab karangan al-Mawardi tersebut hanyalah sebatas notulensi tentang para penguasa di Abad Pertengahan. Karena itu, kajian bidang politik masih sangat memerlukan pengembangan di pesantren. Meski kalangan Sunni tidak memiliki konsep tentang imamah atau kepemimpinan yang jelas dan pasti, namun kekosongan tersebut justru bisa dijadikan arena ijtihad bagi perbaikan konteks politik saat ini.

Langkah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) misalnya dalam mengaktualisasikan demokratisasi dan penegakkan Hak Asasi Manusia dalam konteks NU dan politik Indonesia merupakan salah satu upaya monumental dan strategis. Begitu pula dengan keputusan atau *taqirir* para kiai yang melapangkan jalan bagi pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998. Konsepsi kalangan kiai tentang PKB sudah jauh berbeda dengan format politik NU sebagai partai di tahun 1950-an. Kalau dulu para kiai terjun ke arena politik dengan meninggalkan pesantren, saat ini kiai berpolitik dengan tetap pada posisinya, yakni di tengah umat dan pesantrennya. Se-

mentara panggung politik langsung dipegang kalangan generasi muda yang dipercaya bisa mengemban amanah. Dinamika semacam ini muncul dalam konteks dimana pesantren sudah berinteraksi langsung dengan dunia luar. Terutama dengan kalangan LSM/NGO, perguruan tinggi maupun elemen-elemen gerakan sosial lainnya.

Dari sini pandangan akan *dikhotomi* ilmu agama dan ilmu umum yang sudah mengakar dalam pesantren perlu kita cairkan dan diluruskan. Imam Ghazali sendiri dalam *Ihya' Ulum al-Din* sebenarnya telah mencairkan hal tersebut. Menurut beliau ilmu itu dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, *Ilmu al-mahmud* dan *ilmu al-madzmun*. *Ilmu al-mahmud* terbagi dalam dua kelompok, *pertama*, kelompok ilmu *fardlu 'ain* seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, dan *kedua* ilmu *fardlu kifayah*. Kelompok kedua ini masih terbagi lagi dalam dua sub kelompok, *ilmu fardlu kifayah yang dlaririy* seperti ilmu al-tibb (kedokteran) dan *ilmu fardlu kifayah yang ghair al-dlaruri* seperti ilmu pertukangan, arsitektur dan perindustrian. Wal hasil Imam Ghazali hanya memandang ilmu itu ada yang *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah* saja, yang

tidak membedakan antara ilmu agama dengan umum.

Meskipun Imam Ghazali mengklasifikasikan *'ilm al-shina'ah*, (kalau sekarang industrialisasi) sebagai *ilmu fardlu kifayah ghair dlaruri*. Menurut saya saat ini perlu kita rekonstruksi lagi. Artinya ilmu yang berkaitan dengan industrialisasi itu bukan lagi sebagai suatu ilmu yang *fardlu kifayah ghair al-dlaruriy* lagi namun sudah saatnya sebagai suatu *ilmu fardlu kifayah yang dlarury*.

Meskipun demikian, dikotomi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum, merupakan salah satu agenda penting yang harus segera dicairkan oleh komunitas pesantren. Pemilah-milahan ilmu agama di satu sisi dengan ilmu umum di sisi lain, jelas selamanya akan memojokkan pesantren pada posisi yang marjinal. Bagaimana mungkin akan menjadi penentu kebijakan negara manakala pengetahuannya hanya sebatas halal-haram atau sebatas *nahwu-sharaf* saja? Kesalahpahaman - ma'af - para kiai kita yang seakan-akan kalau mempelajari sains, matematika, biologi, kimia atau ilmu eksakta lain bukan bagian dari agama haruslah dikikis habis jika pesantren ingin menjadi pioner pembawa panji kosmopolitan umat di abad-abad mendatang.

Perubahan tersebut sudah barang tentu disertai perombakan kurikulum dan metodologi pengajaran. Pada MTs/MA yang menerapkan 75 % umum dan 25 % agama jelas sudah tidak relevan lagi. Begitu pula dengan beberapa SLTP/SLTA/PT ber-label plus Islam, bahkan termasuk juga IAIN. Karena, selama ini institusi semacam itu hanya akan menghasilkan manusia yang setengah-setengah. Output lembaga tersebut mau disebut ulama' tidak layak, ilmuan apalagi.

Salah satu pola yang belum pernah diwujudkan selama ini adalah dengan tetap mempertahankan sistem pesantren sebagai dasar pendidikan. Namun, setelah menyelesaikan pendidikan tingkat *Tsanawi* (menengah), para siswa (santri) diharuskan meneruskan ke jenjang takhassus (spesialisasi). Pada taraf tingkat takhassus inilah mereka diharapkan akan mengembangkan potensinya sesuai dengan malakah dan keahlian yang diminati. Tentu spesialisasi yang disediakan tidak hanya terbatas bidang fiqh dan *ilmu-ilmu aqliyah* saja, sebagaimana yang ada di Ma'had Ali dan beberapa Perguruan Tinggi di Timur tengah saat ini, tetapi, seluruh disiplin ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu sosial maupun eksakta



harus disiapkan. Begitu pula dengan jenjang pendidikan Tinggi, harus disiapkan mulai jenjang S1, S2 hingga S3. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut jelas memerlukan penyiapan SDM yang memadai, di samping sarana, prasarana dan biaya yang tidak sedikit. Namun bagaimanapun harus kita mulai saat ini. Seberapapun wujud perjuangan dan pengorbanan yang khalis dan kita untuk realisasi himmah di atas, akan menjadi sanksi dan mewarnai revivalisme umat Islam yang sejati.

Perlu diakui, keberadaan pesantren belum terkelola dengan baik. Gagasan dan sikap hidup yang tulus dari para kyai, belum terungkap secara jelas dan sebaliknya seringkali dinilai dengan pandangan yang kurang baik. Misalnya, ikut sertanya kyai di ranah politik yang dilihat sebagai suatu bentuk “penyimpangan” dari khittah kekayaan. Silahkan saja mengkritik pesantren demi kemajuan, tetapi jangan sampai menafikan kontribusi pesantren yang luar biasa di masa lalu.

Ada tiga hal yang belum dikuatkan dalam pesantren. Pertama, *Tamaddun* yaitu memajukan pesantren. Banyak pesantren yang dikelola secara sederhana. Manajemen dan administrasinya masih bersifat kekeluargaan dan semuanya dita-

ngani oleh kyainya. Dalam hal ini, pesantren perlu berbenah diri.

Kedua, *Tsaqafah*, yaitu bagaimana memberikan pencerahan kepada umat Islam supaya kreatif-produktif, dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Salah satu contoh keberhasilan adalah pesantren Sidogiri di Pasuruan. Santri masih setia pakai sarung, cium tangan kyai dan tradisi lainnya, tetapi mereka sudah biasa komputerisasi, memiliki badan usaha sendiri yang sukses, asset yang besar dan kyainya tidak ikut campur tangan.

Ketiga, *Hadharah*, yaitu membangun budaya. Dalam hal ini, bagaimana budaya kita dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam. Kita bisa menjumpai kata-kata dalam bahasa Indonesia banyak yang mengadopsi dari bahasa Arab seperti kata-kata adil, musyawarah, hal ihwal, dewan, rahmat, lezat dan lain-lain. Disini, pesantren diharap mampu mengembangkan dan mempengaruhi tradisi yang bersemangat Islam ditengah hembusan dan pengaruh dahsyat globalisasi yang berupaya menyeragamkan budaya melalui produk-produk teknologi.

Dengan demikian, pesantren akan tetap eksis sebagai lembaga pendidikan Islam yang mempunyai

visi mencetak manusia-manusia unggul dengan segala dimensinya. Prinsip yang senantiasa dipakai dalam pesantren adalah “*al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih, wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*” yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang positif. Melalui prinsi yang demikian, pesantren akan tetap memegang teguh jati dirinya dan tidak mudah dilengserkan oleh modernisasi yang kerap kali dicerap secara kurang tepat. Modernisasi adalah rasionalisasi dan membenahi pesantren juga membutuhkan rasionalisasi yang proporsional. Persoalan-persoalan yang berpautan dengan *civic values* akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan tentunya dengan perombakan yang efektif berdaya guna serta mampu memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (*al-musawah bain al-nas*).

Begitupun, prinsip mengemban Islam yang ramah dan cinta kasih merupakan jihad suci. Pemikiran yang demikian sesungguhnya sudah dijadikan dasar oleh pesantren dalam kurun waktu yang lama. Sebab sedari awal, sejak berdirinya pesantren sudah diarahbidikkan sebagai pembaharuan terhadap ma-

sarakat. Dan pembaharuan yang diungkapkan oleh pesantren adalah melalui proses yang lentur, tidak kaku atau menutup diri terhadap dunia luar. Sementara itu, pembaharuan pemikiran yang banyak digaungkan sesungguhnya juga telah dilakukan oleh pesantren melalui khazanah klasik. Di dalam khazanah klasik pluralisme pendapat para ulama telah menjadi kenyataan tersendiri. Hal inilah yang justru menumbuhkan sikap para santri untuk terbuka wawasan, menerima dan sekaligus mengkritisi terhadap gejala-gejala baru yang muncul. Semua ini, diniati oleh pesantren sebagai bentuk dari perjuangan dan pengabdian menuju kemashlahatan umat secara menyeluruh, *‘izzul islam wal muslimin*.(nu)

#### SUMBER BACAAN

- van Bruinessen, Martin (1997): *Pesantren dan Kitab Kuning*. Bandung, Penerbit Mizan.
- al-Ghozali (2000): *Ihya Ulumuddin*. Lebanon, Darul Fikr.
- al-Mawardi (1990): *Al-Ahkam ash-Shulthoniyyah*. Lebanon, Darul Fikr.
- Jampes, Kiai Ihsan (1960): *Siraj ath-Thalibin*. Bandung, Darul Ma’arif
- Wahid, Abdurrahman (1974): “Pesantren sebagai Sub-Kultur.” dalam *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta, LP3ES.